

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi di bidang politik dan kehidupan kenegaraan telah dilakukan dalam empat tahap amandemen Undang-undang dasar (UUD) 1945 serta diundangkannya berbagai perundang-undangan di bidang politik yang bersifat sangat reformatif. Peristiwa politik sangat monumental adalah terselenggaranya dengan baik, tertib dan damainya Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2004, serta Pemilihan Langsung Kepala Daerah yang dimulai bulan Juni 2005. Dalam proses demokrasi tersebut rakyat Indonesia telah mengambil peran strategis. Sukses Pemilu Pilpres, dan Pilkada pada dasarnya adalah sukses rakyat Indonesia sebagai pemilik langsung kedaulatan dalam melaksanakan proses demokratisasi yang telah mendapat pengakuan Internasional.

Selama era reformasi, dalam kurun waktu 1998-2004 merupakan masa yang paling berat dalam sejarah kehidupan Partai Golkar. Partai Golkar mendapat tekanan terus menerus dari berbagai pihak berupa pembentukan opini negatif yang merugikan. Di berbagai tempat terjadi aksi dan demonstrasi anti Partai Golkar yang disertai ancaman fisik dan teror terhadap kader, pengurus, dan pimpinan partai. Bahkan Partai Golkar mengalami pula pengrusakan sarana fisik seperti fasilitas kantor partai, hingga ancaman pembubaran melalui pengadilan dan Dekrit Presiden.

Setelah pendeklarasian tepatnya pada tanggal 7 Maret 1999, Partai Golkar mengumumkan apa yang disebutnya sebagai sebuah paradigma baru¹, yaitu pertama, pemutusan hubungan dengan Orde Baru kendati tidak mengingkari kaitan sejarahnya dengan Sekber Golkar yang lahir pada bulan Oktober 1964. Kedua, restrukturisasi kepengurusan partai dengan menghilangkan sebuah struktur yang pada masa lampau sangat menentukan mati hidupnya Partai Golkar yaitu, dewan pembina. Di masa lalu, dewan pembina inilah yang menjadi pusat kekuasaan dan memiliki otoritas penuh dalam membekukan dan membubarkan DPP Golkar. Hal ini ditengarai telah memunculkan penyakit *bapakisme*, yang serba ditentukan oleh sang Bapak (Soeharto) dan menyuburkan praktek *Asal Bapak Senang (ABS)* yang sekaligus mematikan kritisisme di kalangan penyokong Golkar. Oleh karenanya, restrukturisasi ini dianggap sebagai tonggak penting di dalam pembaruan dan pengembangan Partai Golkar.

Ketiga, sebagai manifestasi dari komitmen Partai Golkar pada demokrasi, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah, Partai Golkar mempraktekkan pemilihan ketua umum secara langsung dalam Munaslub. Keempat, demi memantapkan kemandirian partai, Partai Golkar menghapuskan pelembagaan formal yang disebut “kepemimpinan atau mekanisme tiga jalur” keluarga besar Golkar, yaitu Jalur A (ABRI dan keluarga besarnya), Jalur B (Birokrasi atau pemerintahan), Jalur G (Golkar sendiri). Kelima, sejalan dengan semangat reformasi, Partai Golkar mengambil langkah-langkah pemulihan dan kredibilitas organisasi

¹ Umar Ibnu Alkhatib, *Dari beringin ke beringin sejarah kemelut resistensi dan daya tahan partai Golkar*, Ombak, Yogyakarta, 2009, Hal 43-44.

dengan melakukan tindakan pada kader dan anggota yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kurun waktu tersebut Partai Golkar telah mengikuti dua kali Pemilihan Umum, dan Partai Golkar tetap bisa mendapat kepercayaan rakyat sehingga menempati posisi pemenang kedua dalam Pemilu 1999 dan pemenang pertama pada Pemilu 2004. Dari kedua pemilu tersebut, perlu dilakukan kajian agar dapat diperoleh identifikasi dan inventarisasi seluruh kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman bagi Partai Golkar. Munas VII Partai Golkar pada Desember 2004 merupakan tonggak sejarah yang dapat membawa Partai Golkar untuk kurun waktu lima tahun ke depan (2004-2009) menjadi periode kebangkitan. Untuk itu Partai Golkar harus mampu tampil dengan strategi baru untuk menjawab perubahan dan tantangan tersebut sehingga menjadi partai politik unggulan dan terdepan, yang menjadi kekuatan utama dan pilar utama dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Mengingat hal tersebut, maka pemahaman dan penghayatan terhadap eksistensi Partai Golkar, yang tercemin dalam paradigma, platform, AD/ART serta programnya menjadi sebuah keniscayaan. Demikian pula sejarah kelahiran Partai Golkar sejak tahun 1964 tidak dapat ditinggalkan karena mengandung nilai historis dan kejuangan yang masih tetap relevan.²

Pada Pemilu 1999 Partai Golkar memperoleh suara sebesar 24% dan menempatkan pada posisi pemenang kedua setelah PDI-P. Ini

² Kelompok Materi Pokok, Ke-Golkar-an, Lpk DPD Partai Golkar, hal.1-2.

merupakan sebuah hasil di luar dugaan banyak pengamat, karena disebabkan hujatan dan hantaman yang diperolehnya sejak turunnya Presiden Soeharto membuat Partai Golkar sulit bergerak. Di samping itu, sejumlah kader telah meninggalkannya dan mendirikan partai baru atau bergabung dengan partai lain.

Pada Pemilu 2004 terjadi pemulihan Partai Golkar sehingga mampu menjadi pemenang pada pemilu legislatif secara nasional. Dengan kekuatan di lembaga legislatif yang dimiliki oleh Partai Golkar saat ini, diharapkan menjadi modal utama bagi Partai Golkar dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Pada RAPIM-I Partai Golkar tahun 2005, posisi Partai Golkar yang semula sebagai kekuatan penyeimbang berubah menjadi pendukung pemerintah. Dalam memberikan dukungan kepada pemerintah, Partai Golkar senantiasa bersikap kritis, objektif, dan proporsional terhadap setiap langkah dan kebijakan pemerintah.

Kurun waktu lima tahun (2004-2009) adalah periode kebangkitan Partai Golkar. Dimana akan menjadi proses perubahan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dengan dinamika kehidupan politik yang berbeda dan tantangan yang lebih berat. Untuk itu Partai Golkar harus mampu tampil dengan strategi baru untuk menjawab perubahan dan tantangan tersebut, sehingga menjadi partai politik unggulan dan terdepan, kekuatan utama dan pilar utama dalam kehidupan demokrasi Indonesia.³

³ Ibid. hal.36-37.

Partai Golkar merupakan partai yang menghormati dan mendorong kemajemukan. Partai yang terdiri dari kumpulan manusia Indonesia yang berasal dari berbagai keyakinan, pemikiran, latar belakang, etnis, suku, agama dan gender, serta menganut sistem non-sektarial dan non-diskriminatif, mereka disatukan ke dalam Partai Golkar dengan mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta hak-hak asasi manusia.

Untuk membangun kehidupan politik yang demokratis, maka strategi Partai Golkar untuk meraih kemenangan pada Pemilu Legislatif 2009 menjadi fungsi dan tugas partai politik harus benar-benar menciptakan paradigma baru yang dapat berpartisipasi aktif penuh dan bertanggung jawab. Sebagai partai yang modern, Partai Golkar memiliki sejumlah potensi atau kekuatan yang dapat dijadikan modal perjuangan dalam rangka merealisasikan kemenangan pada pemilu 2009, antara lain.⁴

Pertama, Potensi historis, Partai Golkar yang telah berusia lebih dari tiga setengah dasawarsa yang didukung oleh kekuatan-kekuatan masyarakat dari seluruh lapisan.

Kedua, Partai Golkar memiliki infrastruktur yang sangat kuat yang masih terpelihara dengan baik, struktur organisasi mulai dari pusat sampai ke desa/kelurahan berjalan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing dalam satu kesatuan manajemen organisasi yang modern.

⁴ Ibid.

Ketiga, Partai Golkar memiliki sumber daya manusia yang relatif berpengalaman, unggul dan lengkap. Kader-kader Partai Golkar tersebar dan hidup ditengah-tengah masyarakat, dan selalu tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Keempat, Partai Golkar adalah partai yang solid yang terbukti selalu dapat mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya secara sinergis untuk berjuang membangun kehidupan bangsa yang bersatu dan kuat.

Kelima, Partai Golkar adalah partai yang mengakar dan responsif, karena merupakan partai politik yang didalamnya para anggota dan kader-kadernya tumbuh dan berkembang dari bawah dan berprestasi (*merit system*).

Keberadaan kalangan pemilih pemula telah menjadi objek kajian politis bagi hitungan Pemilu Legislatif yang lalu. Kurang lebih 20% pemilih pemula atau sekitar 36 juta orang, yang merupakan generasi muda, akan menjadi sasaran empuk bagi para partai politik yang ada. Tentu hal ini tidak akan disia-siakan begitu saja, lantaran jumlahnya yang cukup signifikan. Pemilih pemula menjadi ladang emas suara bagi keseluruhan partai politik. Siapapun itu yang bisa merebut perhatian kalangan ini tentu akan bisa dirasakan keuntungannya. Lahirnya dukungan dari kelompok ini secara tidak langsung membawa dampak pencitraan yang sangat berarti. Setidaknya untuk pengamanan proses regenerasi kader politik itu sendiri ke depan, meski membutuhkan *maintenance cost* yang tidak sedikit juga. Ketiadaan dukungan dari kalangan ini tentu akan terasa cukup merugikan bagi target-target suara pemilu yang telah ditetapkan tiap-tiap parpol.

“Pemilih pemula di Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 217.127 dari total jumlah pemilih yang jumlahnya 2.746.032. Meski jumlahnya tidak signifikan, Komisi Pemilihan Umum DIY memperkirakan, pemilih pemula tidak akan golongan putih alias tidak memilih. Menurutnya, revisi terhadap DPT di Kota Yogyakarta itu dilakukan tanggal 5 Maret 2009 lalu. Sebelumnya DPT Kota Yogyakarta berjumlah 329.357. Namun setelah dilakukan verifikasi dan cek ulang berdasarkan Perpu nomor 1 tahun 2009 diketahui bahwa jumlah DPT Kota Yogyakarta mencapai 329.685 orang, dan Sembilan persen atau 29.671 merupakan pemilih pemula”⁵.

Pada Pemilu 2009 begitu banyak partai politik yang telah menetapkan kalangan pelajar, pemilih pemula, sebagai target dukungan suara. Partai Golkar secara terbuka mensosialisasikan dirinya melalui media massa menyatakan siap merangkul kalangan ini. Fasilitas-fasilitas yang dikhususkan untuk kalangan pemula disiapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka untuk berekspresi sesuai minat dan hobi. Partai Golkar juga menyiapkan serangkaian program yang cukup fantastis untuk bisa menarik minat pelajar untuk terlibat secara aktif.

⁵ Tempointeraktif.com, Kamis 22 Januari 2009.

Perbandingan statistik perolehan suara lima besar pada Pemilu Legislatif 1999, 2004 dan pemilu 2009 DPR-RI di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu. Sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Perolehan Suara Lima Besar Pada Pemilu 1999

NO.	NAMA PARTAI	KOTA YOGYA	BANTUL	SLEMAN	GUNUNG KIDUL	KULON PROGO	JUMLAH	%
1.	PDIP	97.972	148.558	189.527	134.586	72.559	643.202	35,65
2.	PAN	59.108	80.063	100.832	38.152	33.464	311.619	17,27
3.	GOLKAR	27.438	52.850	61.762	79.797	36.898	258.745	14,34
4.	PKB	11.290	87.364	73.069	43.517	42.000	257.240	14,26
5.	PPP	12.430	25.138	27.601	12.131	10.565	87.865	4,87

Sumber: diolah dari data perolehan suara Pemilu 1999 KPUD DIY

Tabel 1.2.
Perolehan Suara Lima Besar Pada Pemilu 2004

NO.	NAMA PARTAI	KOTA YOGYA	BANTUL	SLEMAN	GUNUNG KIDUL	KULON PROGO	JUMLAH	%
1.	PDIP	59.758	151.336	104.288	99.839	49.840	465.061	26,30
2.	PAN	52.848	80.218	99.216	56.761	39.197	328.240	18,57
3.	GOLKAR	23.804	37.098	50.610	99.563	34.091	245.166	13,87
4.	PKB	6.539	54.655	47.644	3.136	16.372	183.097	10,36
5.	PKS	24.990	32.362	47.644	16.802	16.372	138.170	7,82

Sumber: diolah dari data perolehan suara Pemilu 2004 KPUD DIY

Tabel 1.3.
Perolehan Suara Lima Besar Pada Pemilu 2009

NO.	NAMA PARTAI	KOTA YOGYA	BANTUL	SLEMAN	GUNUNG KIDUL	KULON PROGO	JUMLAH	%
1.	PDIP	42.554	106.435	84.378	67.633	32.320	333.320	18,98
2.	PD	50.405	72.189	76.120	62.716	29.122	290.552	16,54
3.	PAN	26.414	50.879	57.456	66.963	34.678	236.390	13,46
4.	GOLKAR	15.800	41.126	49.784	49.255	24.743	180.708	10,29
5.	PKS	23.118	46.346	63.806	21.314	22.061	176.645	10,06

Sumber: diolah dari data perolehan suara Pemilu 2009 KPUD DIY

Pada Pemilu 1999 di Kota Yogyakarta Partai Golkar menduduki peringkat ketiga di bawah Partai PDI-Perjuangan dan Partai Amanat Nasional dengan memperoleh 27.438 suara, dan pada Pemilu 2004 lalu, Partai Golkar mengalami penurunan jumlah suara, dan tetap berada di peringkat ketiga dengan memperoleh 23.804 suara.

Pada Pemilu Legislatif 2009 yang lalu, perolehan suara di Kota Yogyakarta, dari 14 kecamatan yang terbagi dalam lima dapil, jawaranya adalah Partai Demokrat di posisi pertama partai berlambang piramid itu mengumpulkan 50.405 suara. PDI-P di posisi kedua dengan 42.554, disusul PAN 26.414, PKS 23.118, dan Partai Golkar 15.800 suara.

Melihat hasil dari Pemilu Legislatif 2009 suara Partai Golkar mengalami penurunan dengan memperoleh suara 15.800 suara dan harus puas di peringkat kelima, dibawah PD, PDIP, PAN dan PKS.

“Saya tidak kaget melihat perolehan suara Golkar pada pemilu tahun ini turun dibandingkan dengan Pemilu 2004. Turunnya suara Golkar kemungkinan disebabkan tidak adanya kepastian dari DPP tentang calon presiden (capres) yang akan diusung menjelang Pemilu 2009,” kata Sultan, Sabtu(11/4)ini. Kondisi itu, menurut dia mengakibatkan antara DPP dengan DPD Partai Golkar kurang sinkron dalam menyikapi pencapresan pada Pemilu 2009. DPP dengan DPD Partai Golkar terkesan berjalan sendiri sendiri, sehingga koordinasi dan konsolidasi menjelang pelaksanaan pemilu legislatif menjadi tidak maksimal”.⁶

Partai Golkar yang mempunyai visi misi dan tujuan untuk mewujudkan demokratisasi di Indonesia dalam Pemilu 2009, memiliki peluang yang cukup besar dalam menarik jumlah suara yang lebih banyak

⁶ Harian Jogja, 11 April 2009.

lagi. Salah satu potensi yang harus disiasati oleh Partai Golkar adalah pemilih pemula.

Pentingnya sebuah strategi bagi sebuah partai politik dalam meraih tujuannya membuat peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah topik penelitian. karena semua partai politik yang mengikuti Pemilu Legislatif tentunya memiliki strategi-strategi yang berbeda dalam upayanya meraih suara pemilih pemula. Dengan melihat hasil perolehan suara pada pemilu Legislatif lalu dimana perolehan suara Partai Golkar mengalami penurunan yang cukup signifikan di banding pemilu sebelumnya, dan sejauh mana Dewan Pimpinan daerah Partai Golkar Kota Yogyakarta memandang pentingnya pemilih pemula untuk perolehan suara maka peneliti ingin melihat bentuk-bentuk strategi yang telah dilakukan Partai Golkar, khususnya DPD Golkar Kota Yogyakarta dalam meraih suara pemilih pemula dan seberapa efektifkah strategi yang telah dilakukan. Alasan peneliti memilih Partai Golkar sebagai objek penelitian dikarenakan Partai Golkar adalah sebuah partai besar yang tetap eksis dari pemilu ke pemilu dan memiliki pengaruh yang besar di dalam Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Penelitian ini dilakukan di kantor Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golkar Kota Yogyakarta, untuk itu peneliti mengambil judul ***“Strategi Partai Golkar dalam Meraih Suara Pemilih Pemula pada Pemilu Legislatif 2009”***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana Strategi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Yogyakarta dalam Meraih suara Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Legislatif 2009?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut.

- a. Mendeskripsikan strategi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Yogyakarta dalam meraih suara pemilih pemula.
- b. Mengetahui efektivitas strategi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Yogyakarta dalam meraih suara pemilih pemula.

2. Manfaat

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang strategi partai politik dalam meraih suara pemilih khususnya pemilih pemula.
- b. Menambah khasanah kajian dan mengisi kepustakaan yang berkaitan dengan partai politik.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori guna menganalisis suatu permasalahan untuk dijadikan acuan berpikir berupa konsep dan teori untuk mempermudah dan juga memahami tentang konsep-konsep yang digunakan dalam menganalisa suatu permasalahan, kerangka dasar dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut.

1. Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani "Strategos" (**stratos**= militer dan **ag**= memimpin), yang berarti "generalship" atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam dunia perang.

Strategi selalu memberikan "keuntungan" untuk mencapai tujuan dengan cara tersendiri, "trik" sendiri, setidaknya taktik merupakan penjabaran operasional dari strategi.

Bryson secara sederhana mendefinisikan strategi sebagai "*a plan to achieve mission and meet the mandates*" atau suara untuk memilih misi dan melaksanakan mandat. Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan, program, kegiatan, keputusan, maupun pengalokasian sumber daya yang menentukan apa organisasi itu, apa yang dikerjakan dan mengapa ia melakukan itu. Dengan demikian strategi merupakan pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi itu dengan lingkungannya, sehingga strategi merupakan *outline* respon organisasi terhadap tantangan-tantangan organisasi yang dihadapi.

Lebih lanjut, strategi merupakan suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihinya, sekaligus untuk

melaksanakan mandat/tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal.

Sebagai sebuah rencana, maka strategi tidak dengan sendirinya akan mampu meraih apa yang diharapkan begitu selesai disusun. Faktor implementasi dari sebuah strategi itulah yang mempengaruhi keberhasilan strategi tersebut. Sebaik apapun suatu strategi, tidak akan berhasil apabila jelek dalam mengimplementasikannya. Sebaliknya, apabila suatu strategi disusun biasa-biasa saja, namun bagus dalam melaksanakannya niscaya akan membuat strategi tersebut berhasil. Hal ini telah diilustrasikan oleh Bryson sebagai berikut.⁷

General strategi will fail if specific step to implement them are absent, further are prone to failure if there is no consistency between what on organization say, what is pays for and what it does.

Dari pernyataan tersebut, disimpulkan bahwa suatu strategi dapat berhasil dengan adanya konsistensi antara strategi dan implementasinya.

Strategi bukan merupakan pedoman kaku (*rigid*) bagi implementasi, karena filosofi penyusunan strategi adalah sebagai jembatan organisasi dengan lingkungannya, sehingga tetap dimungkinkan adanya suatu fleksibilitas yang adaptif namun tetap relevan.

Dengan definisi strategi di atas, maka pada dasarnya setiap organisasi memiliki strategi dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan organisasi. Strategi dalam organisasi berpengaruh terhadap tujuan,

⁷ Bryson,H.M, Perencanaan strategi bagi organisasi, pustaka pelajar, yogyakarta, 2000, cet II, Hal. 130.

kebijakan-kebijakan, program-program, kegiatan-kegiatan, keputusan-keputusan, dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Dalam suatu organisasi, strategi yang di pandang bagus, sesuai dan nyata, dapat memberikan kontribusi kemajuan perlu dipertahankan keberadannya. Sedangkan untuk strategi yang sudah di pandang tidak sesuai dan tidak dapat memberikan kontribusi kemajuan pada organisasi, perlu untuk dirumuskan kembali, dengan maksud agar hubungan antar Faktor internal dan eksternal organisasi dapat *match*.

Suatu strategi yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria seperti yang dipaparkan dikatakan oleh Brison,⁸ sebagai berikut.

1. Strategi secara teknis harus dapat dikerjakan.
2. Strategi secara politis harus dapat diterima oleh para *key stakeholders*.
3. Strategi harus sesuai dengan filosofi dan nilai-nilai organisasi.
4. Strategi seyogyanya bersifat etis, koral, legal, serta merupakan keinginan organisasi untuk menjadi baik.
5. Strategi harus sesuai dengan isu strategi yang hendak dipecahkan.

Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa strategi bagi suatu organisasi merupakan alat untuk meraih tujuan. Sementara itu dalam konsep sistem, organisasi terdiri dari sub-sub sistem yang lebih kecil, yang masing-masing mempunyai tujuan khusus, sehingga terdapat tingkatan-tingkatan tujuan yaitu: tujuan menyeluruh organisasi dan tujuan inkremental sub-sub sistem, yang masing masing memerlukan strategi pencapaiannya.

⁸ Ibid.

Dengan demikian adapula tingkatan-tingkatan (level) dalam strategi, dari strategi yang bersifat menyeluruh, strategi lebih sempit seperti sub unit hingga ke strategi dalam skala yang lebih kecil. Ada beberapa kategori *level* strategi yang diutarakan oleh berbagai pakar. seperti Bryson mengkategorikan strategi dalam 4 *level* dasar, yaitu⁹:

1. *Grand strategies for the organization as a whole;*
2. *Sub unit strategies submits maybe devision, departements, or units of large of organization.*
3. *Program, service, or businiss strategies.*
4. *Functional strategies.*

Satu prinsip dasar dalam pengelolaan yang sistematis bahwa strategi yang lebih kecil adalah bagian dari dan selalu mengacu kepada strategi yang lebih besar.

2. Partai Politik

Berdasarkan aspek kesejarahannya, sejarah awal lahirnya partai politik bisa di pisah menjadi dua karakteristik umum, yaitu partai politik yang lahir dalam parlemen dan partai politik yang lahir ekstraparlemen.

a. Pengertian Partai Politik

1. Menurut Richard W.Scott

Partai politik adalah organisasi yang bagaimanapun memiliki aturan formal dan tujuan yang juga formal. Namun proses dimana mereka menjadi terlembagakan tidaklah identik dengan bagaimana perkembangan partai dalam terminologi partai yang bersifat organisasional semata.

⁹ Ibid. hal. 32.

2. Menurut Raymond Girfield Gettel

Partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memakai kekuasaan bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan mereka¹⁰.

3. Menurut Mark M. Hagopian

Partai politik adalah “suatu organisasi yang di bentuk untuk mempengaruhi bentuk karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan”.

Dari devinisi ini maka dapat disimpulkan bahwa;

- **Partai** suatu wadah sebagai fasilitas yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membentuk suatu organisasi guna mensinyalir kebijakan masyarakat sebagai kepentingan ideologi.
- **Poilitik** ilmu tentang karakter kebijaksanaan publik yang mengkaji prinsip-prinsip ideologis secara langsung atau partisipasi kekuasaan rakyat dalam memperoleh suatu kebijakan. Fenomena ini masih relatif baru, studi ini menyangkut tentang tingkah laku voters.

¹⁰ Raymond Girfield Gettel, dalam Ulung Pribadi, Diktat Kuliah Pengantar Ilmu Politik, UMY, 2001, hal, 43.

b. Fungsi Partai Politik

Merriam Budiarto menyebutkan, dalam negara yang menganut paham demokrasi, partai politik menjalankan beberapa fungsi, seperti berikut.

1. Sosialisasi Politik

Proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, Non-formal dan informal maupun tidak sengaja melalui kontak pengalaman kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga atau dalam kehidupan masyarakat.

2. Rekrutmen Politik

Seleksi pemungutan atau pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sebuah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

3. Partisipasi Politik

Kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pelaksanaan dan pembuatan kebijakan umum serta ikut dalam menentukan pemimpin pemerintah.

4. Memadu Kepentingan

Untuk memadu dan menampung berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

5. Komunikasi Politik

Proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

6. Pengendalian Konflik

Mengendalikan konflik yang timbul dalam sistem politik melalui lembaga demokrasi untuk mendapatkan keputusan penyelesaian dalam bentuk keputusan politik.

7. Kontrol Politik¹¹

Kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dari isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Dari tujuh fungsi partai politik tersebut ada fungsi lainnya yang mana fungsi tersebut lebih banyak dimengerti oleh khalayak umum dan juga disebut sebagai fungsi utama partai politik, adapun fungsi tersebut yaitu:

1. Mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.
2. Mengumpulkan, mengorganisasi dan merumuskan aspirasi masyarakat untuk diperintahkan oleh sistem politik.
3. Menempatkan wakil-wakil yang di pandang cukup untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.¹²

¹¹ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, PT.GRAFINDO, Jakarta, 1992, hal.116-121.

¹² RiswandaImawan, Membedah Politik Orde Baru, CV.Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal, 5.

c. Tugas Partai Politik

1. Menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah, partai politik di sini bertugas untuk menampung semua pendapat dan keinginan rakyat atau khalayak, kemudian langkah selanjutnya memilih dan merumuskan serta menyerahkan kepada pemerintah untuk dijadikan politik yang akan diperjuangkan semaksimal mungkin.
2. Partai politik juga mempunyai tugas untuk memperluas gagasan atau ide-ide yang tersimpul di dalam kebijaksanaan pemerintah.
3. Partai politik mempunyai tugas untuk menambahkan dan memupuk akan loyalitas nasional.
4. Partai politik bertugas dan mengajak ikut serta mereka yang kelihatan, dianggap berbakat, dan mampu ikut serta dan relatif dalam lapangan kegiatan politik dan mendidik mereka untuk menjadi kader pemimpin.
5. Partai politik bertugas untuk mengatur pertikaian dan membantu merumuskan konflik-konflik dan selanjutnya berusaha mengatasi konflik tersebut serta mencari penyelesaiannya.¹³

¹³ Sulistiawati Ismail Gani, Pengantar Ilmu Politik. PT.Galia Indonesia [t.t], hal 13.

3. Pemilih pemula

Pemilih pemula oleh Ganewati Wuriandari disebut pemilih muda, yaitu “seorang yang baru pertama kali ikut pemilu”.¹⁴

Penulis cenderung menyebut pemilih pemula, dikarenakan dengan cara membahas definisi tiap kata, jauh diperoleh kebenaran definisi. Pemilih pemula terdiri dari kata “pemilih” dan “pemula”, Pemilih menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah” orang yang memilih dengan teliti”, sedangkan kata pemula adalah “seorang yang mula-mula melakukan sesuatu”.

Jadi pemilih pemula adalah seseorang yang mula-mula diberi kesempatan untuk memilih dengan teliti terhadap suatu objek tertentu. Untuk memperoleh definisi secara luas sesuai subjek spesialisasi penyusun, khususnya ilmu pemerintahan dengan meninjau pelaksanaan pendaftaran pemilih.

Sedangkan asas-asas pemilu terdiri dari asas umum, langsung, bebas dan rahasia. Salah satu asas umum menyatakan bahwa pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat minimal dalam usia, yaitu yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin berhak untuk mengikuti pemilihan. Dengan demikian, seorang pemilih dalam pemilihan harus terlebih dahulu memenuhi syarat yang ditentukan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemilih Pemula adalah semua warga negara yang telah memenuhi syarat minimal dalam

¹⁴ Genewati Wuryandari, Partai Demokrasi dan Pemilihan Umum 1992, Dalam Jurnal Ilmu Politik , No.9, 1991, hal. 59.

usia 17 tahun dan syarat-syarat lainnya yang ditentukan menurut perundang-undangan yang berlaku, diberi kesempatan untuk yang pertama kali untuk memilih dengan sangat teliti sebagai pemilih aktif dalam pemilu. Maka, komposisi umur pemilih pemula dapat diklasifikasikan antara umur 17-22 tahun, dikarenakan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

4. Pemilihan Umum

a. Pengertian pemilu

Pembukaan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, antara lain menyatakan bahwa “kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.

Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang Dasar.

Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dipilih melalui pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun

sekali. Melalui Pemilu tersebut akan lahir lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis.

Dalam Negara Republik Indonesia yang majemuk yang berwawasan kebangsaan, partai politik adalah saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat, bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional dan penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Selain itu, untuk mengakomodasi aspirasi daerah, dipilihlah anggota DPD untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pesertanya adalah perseorangan.

Sesuai amanat reformasi, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Pengertian dan tujuan pemilihan umum dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang No.22 Tahun 2007, bahwa:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah Penyelenggara pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum, undang-undang ini memuat pengaturan yang mengamanatkan agar pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu.
5. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.

6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
10. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk

menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
15. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

18. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
19. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
20. Dewan Kehormatan adalah alat kelengkapan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu yang dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dan dimaksudkan untuk menentukan siapa yang akan memegang pemerintahan negara dalam jangka waktu tertentu, dan sekaligus merupakan kesempatan untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan warga negara terhadap pemerintah guna mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana dimaksudkan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

1. Asas Pemilihan Umum

Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu dilaksanakan

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengertian asas pemilu adalah:

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya, tanpa perantara.

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, serta status sosial.

c. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2. Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), “ pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

- a. Sifat “Nasional” dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Sifat “Tetap” dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
- c. Sifat “mandiri” dimaksudkan bahwa menyelenggarakan dan melaksanakan pemilu, KPU bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peserta Pemilihan Umum dari partai politik dapat menjadi peserta pemilu apabila memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-undang tentang partai politik;
- b. Memiliki kepengurusan di $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah provinsi;
- c. Memiliki kepengurusan di $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;

- e. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- f. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan c ; dan
- g. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

Tahap-tahap penyelenggaraan pemilu menurut Undang-undang Pemilu No.10 Tahun 2008 adalah:

- a. Tahap sebelum pemungutan suara, tahap ini terdiri dari kegiatan-kegiatan:
 - 1. Pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
 - 2. Pendaftaran peserta pemilih
 - 3. Penetapan peserta pemilu
 - 4. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
 - 5. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 - 6. Kampanye
 - 7. Masa tenang

- b. Tahap pemungutan suara
- c. Tahap sesudah berlangsungnya pemungutan suara, tahap ini terdiri dari kegiatan-kegiatan:
 - 1. Penghitungan suara
 - 2. Penetapan hasil pemilu

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan pemilu yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, diperlukan pengawas pemilu dengan kewenangan yang jelas sehingga fungsi pengawasannya dapat berjalan dengan efektif.

b. Sistem Pemilihan Umum

Konsep yang berkaitan dengan Badan Perwakilan Rakyat ialah berupa sistem pemilihan umum. Hal ini disebabkan salah satu fungsi sistem Pemilu ialah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota Badan Perwakilan Rakyat atau menjadi Kepala Pemerintahan. Dengan demikian mempelajari sistem pemilu adalah ruang lingkup yang luas, maka akan ditemui suatu sistem-sistem pemilu yang banyak ragamnya, seperti sistem pemilihan suara terbanyak, sistem pemilihan bertingkat, dan mungkin masih banyak lagi sistem pemilu yang lain. Namun hal dalam penelitian ini hanya mengacu pada sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia.

Sistem Pemilihan Mekanis dan Sistem Pemilihan Organik

a. Sistem Pemilihan Mekanis

Pengertian di dalam sistem pemilihan mekanis, apabila seseorang yang duduk di lembaga perwakilan dengan melalui pemilu, maka sifat perwakilan disebut perwakilan politik (*political representation*).¹⁵

Secara umum perwakilan seperti ini mempunyai kelemahan karena yang biasanya dipilih adalah orang yang populer. Karena reputasi politiknya tetapi belum tentu menguasai bidang-bidang teknis pemerintahan, perekonomian dan sebagainya.

Dalam sistem mekanis partai-partai mengorganisasikan para pemilih, dan disinilah partai-partai politik/organisasi politik berkembang baik menurut sistem satu partai (*One Party System*), dua partai (*Two Party System*) seperti yang dianut oleh liberalisme, sosialisme, maupun komunisme. Bedanya negara-negara liberalisme mengutamakan individu-individu sebagai kesatuan dan memandang masyarakat sebagai suatu kompleks hubungan-hubungan antar individual yang bersifat kontraktual, sedangkan sosialisme terutama komunisme merupakan totalis kolektif masyarakat dan

¹⁵ Bintan R.Saragih, Lembaga Perwakilan Rakyat dan Pemilu di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987, hal, 181.

mengecilkan peranan individu-individu dalam totalis kolektif ini.

Sistem pemilihan mekanis biasanya dilaksanakan dengan 2 (dua) Sistem Pemilu, yaitu:

1. Sistem pemilihan distrik (sistem pemilihan mayoritas/*single member constituency*).
2. Sistem pemilihan proporsional (sistem perwakilan berimbang/*multy member contituence*).¹⁶

b. Sistem Pemilihan Organik

Sistem ini, memandang rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka ragam persekutuan, yang meliputi:

1. Persekutuan hidup geologis (bedasarkan keturunan) : rumah tangga.
2. Lembaga Persekutuan hidup teritorial (bedasarkan tempat tinggal) : desa, kota, daerah.
3. Persekutuan hidup fungsional spesial : cabang industri.
4. Lapisan-lapisan sosial : buruh, tani, nelayan, pedagang, majikan.
5. Lembaga-lembaga sosial: universitas, institut, sekolah tinggi, akademik.¹⁷

¹⁶ Wollhof, Pengantar Ilmu Tata Negara Indonesia, Timun Emas, Jakarta, 1960, hal.174.

¹⁷ Ibid, hal 171-172.

Dari keanekaragaman persekutuan hidup dapat dijelaskan bahwa, rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup secara bersama-sama dalam keanekaragaman warna persekutuan rakyat juga dianggap sebagai suatu organisme atau organ-organ yang memiliki kedudukan dan fungsi tertentu. Persekutuan inilah yang menjadi hak untuk mengutus wakil-wakil kepada Badan Perwakilan Rakyat.

Dalam sistem pemilihan organis, partai-partai/organisasi-organisasi politik tidak perlu dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh masing-masing persekutuan hidup dalam lingkungannya sendiri. Badan perwakilan adalah bersifat badan perwakilan kepentingan-kepentingan khusus persekutuan hidup yang biasa disebut dewan komparasi.

Bedasarkan Undang-undang No.10 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 dan 2, sistem pemilu untuk 2009 adalah:

1. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
2. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak .

Pemilu yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pesertanya adalah partai politik, sedangkan pemilu untuk memilih anggota DPD pesertanya adalah perseorangan.

E. Definisi konseptual

1. Strategi adalah sejumlah langkah-langkah yang kompetitif dengan sejumlah pendekatan untuk menghasilkan *performance* dalam mencapai tujuan. Manajemen *game plan* untuk: menjalankan roda organisasi, memuaskan konsituen, mencapai *performance* target tertentu.
2. Partai politik adalah sekelompok orang dalam organisasi yang teratur, mempunyai cita-cita, orientasi dan tujuan, yakni merebut dan mempertahankan kekuasaan serta melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
3. Pemilih pemula adalah warga negara yang telah memiliki syarat minimal dalam usia 17 tahun, syarat-syarat lainnya yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberi kesempatan yang pertama kali untuk memilih dengan sangat teliti sebagai pemilih aktif dalam pemilu.
4. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dan dimaksudkan untuk menentukan siapa yang akan memegang pemerintahan negara dalam jangka waktu tertentu, dan sekaligus merupakan kesempatan untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan warga negara terhadap pemerintahan guna mewujudkan tata kehidupan negara.

F. Definisi Operasional

Apa yang dimaksud dengan dengan definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian. Agar suatu penelitian dapat diukur variabelnya, maka perlu dioperasionalkan dalam penelitian dengan kata lain variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel yang sudah dicermati.¹⁸

1. Strategi Kedalam/Internal
 - a. Memperkuat Institusi Partai.
 - b. Penggalangan Dana.
 - c. Membangun Sistem Informasi dan Komunikasi.
 - d. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan pengkaderan.

2. Strategi Keluar/Eksternal
 - a. Memaksimalkan kerja Calon anggota Legislatif
 - b. Meningkatkan Citra Partai
 - c. Menjalankan program-program dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang diminati pemilih pemula

¹⁸ Masri singarimbun dan Sofiyon, Metode Penelitian Survey, LP3S, Jakarta, 1989, hal.174

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, adapun penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, selaku objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun kasus peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan dengan fenomena yang diteliti atau diselidiki.¹⁹

2. Unit Analisis

Adapun unit analisis yang dipakai penulis dalam melakukan penelitian terhadap Strategi Partai Golkar dalam Meraih Suara Pemilih Pemula adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Yogyakarta.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan, yaitu Data Primer dan Sekunder, adapun pengertian dari dua data tersebut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden yang berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam dokumen-dokumen tertentu, seperti buku-buku, dokumen partai politik, surat kabar dan sebagainya yang relevan dengan penelitian ini.

¹⁹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal, 163.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik wawancara

Teknik wawancara yaitu teknik usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.²⁰ Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan terhadap ketua, Bapak Drs.Suhartono,ST., Bidang Kesekretariatan, Bapak Malik, dan biro pemenangan pemilu Bapak Sugianto Syaputro, BA. dan Anggota Legislatif DPRD Kota Bapak.Augusnur, SH.,S.IP.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui berbagai dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian berupa buku-buku, catatan-catatan, laporan dan sebagainya yang relevan dengan fokus penelitian.

5. Alasan Pemilihan Lokasi

Dipilihnya lokasi penelitian di DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta karena daerah kota merupakan salah satu daerah yang memiliki basis massa yang besar dan secara organisasi termasuk mapan.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian tentang strategi Partai Golkar dalam meraih suara pemilih pemula ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Menurut koentjraningrat, analisis data dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif.

²⁰ Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hal, 111.

“Apabila data yang dikumpulkan itu hanya sedikit bersifat monografis atau terwujud kasus-kasus (sehingga dapat disusun dalam struktur klasifikasi) maka analisis data yang dikumpulkan itu berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori maka analisis kualitatif yang digunakan.”²¹

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik utuh.²²

Dalam menganalisa penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif interpretatif, yaitu dengan cara mengkualifikasikan data yang diperoleh kemudian menganalisis sesuai dengan gejala objek yang diteliti dan menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada, muncul terjadi dari data-data yang terkumpul dan disesuaikan dengan data yang ada. Sehingga dari interpretasi ini dapat memberikan suatu deskripsi, gambaran secara holistik mengenai masalah yang diteliti. Dengan membuat pengklasifikasian dalam teknik analisa data dimaksudkan mempermudah penulis menganalisa permasalahan secara sistematis.

²¹ Koentjraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, PT.Gramedia, Jakarta, 1991,hal.228.

²² Bogdan dan Taylor, dalam lexi moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung,1994, hal, 8.